

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajiprasetyo, Muhammad Khaisar, 2020, “Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY” Yogyakarta
- Aldrin, Wailim. 2017. Larangan Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Politik.
- Data Temuan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Depok*
- Gunawan, Suswanto, 2016, *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Jakarta: Erlangga.
- megapolitan.kompas : 2020, November 05. Diakses pada 16 desember 2021  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/05/13472131/bawaslu-3-asn-kota-depok-diduga-terlibat-kampanye-pilkada?page=all>
- R.Terry, George. 2006. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Rahma Andayani, 2018 “*Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).
- Saputra, Dwi Asbudi, 2020, “*pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn) oleh bawaslu kota palopo pada pemilu 2019*”.Jakarta
- Schermerhorn, John R. (2013). Management, 12th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Sugiyono. (2013)

- Simbolon, Maringan Masry 2004, “*Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*”, Jakarta, Indonesia, Ghalia.
- Staronova, Katarina, Gajduscheck, G. (2013). *Civil Service Reform in Slovakia and Hungary: the Road to Professionalisation?* In L. Neuhold, Christine, Vanhoonacker, Sophie, Verhey (Ed.), *Public Sector Organization Civil Servant and Politics a Delicate Balance* (pp. 123-151). England: PALGRAVE MACMILLAN
- Satori Djam’an, Komariah Aan. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014 *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tjiptoherijanto , Prijono, 2018. “*Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*” -Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara. (11-13)
- Ukas, DKK, 2020. “*penegakan kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 pada pemilu anggota dpr, dpd dan dprd di provinsi kepulauan riau*”, Kepri
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1998 “*Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*”. Jakarta, Rineka Cipta. Hlm 21
- Widuri Wulandari, 2015, “*Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)

Gambar :

1. Gambar 1.1 Model Analisis Data Interaktif Sumber: Hardani (2020:174)
2. Gambar 1.2 Struktur kepengurusan Bawaslu Kota Depok  
(Sumber :Bawaslu.kotadepok.go.id)
3. Gambar 1.3. Sosialisasi terhadap pihak pengawas dari Sekjen  
Bawaslu GunawanSuswantoro. (Sumber Bawaslu.go.id)
4. Gambar 1.4 sosialisasi Bawaslu RI kepada ASN dalam  
menghadapi pemilu(Sumber Bawaslu.go.id)
5. Gambar 1.5 Sosialisasi Bawaslu kota Depok kepada masyarakat  
pegiat pemilu(Sumber : Bawaslu.kotadepok.go.id)
6. Gambar 1.6 Ilustrasi Pelporan saksi  
(sumber:<https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1923240465/ingin-lapor-dugaan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-caranya?page=1>)
7. Gambar 1.7 Netralitas ASN (Sumber: KASN.go.id)
8. Gambar 1.8 Jalan Politik Praktis Sebagai Ambisi ASN(Sumber: KASN.go.id)
9. Gambar 1.9 Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu kota depok kepada  
ASN kotaDepok